

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG KEDAMEAN GRESIK

Asmaul Kusna¹, Yuni Sukandani²
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email : asmaul.kusna23@gmail.com¹
Koresponden : yunis@unipasby.ac.id²

ABSTRAK

Pada riset ini pendekatan yang dipakai ialah secara kualitatif deskriptif, adapun tujuan untuk menganalisa pengelolaan keuangan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Diperoleh hasil pengelolaan keuangan dana desa dilakukan telah sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemerintah telah sepakat menetapkan prioritas pemakaian dana desa untuk dipakai sesuai dengan peraturan Menteri Desa No.16 Tahun 2018. Penggunaan serta pemanfaatan dana desa yang dipakai untuk program serta dalam menjalankan aktivitas disektor pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Hasil lain yang didapatkan ialah pemerintah dapat memakai riset ini sebagai acuan pada proses pengambilan keputusan serta pertimbangan terkait kebijakan yang ditetapkan.

Kata kunci : Pengelolaan keuangan, pembangunan & kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

In the approach that is accessed qualitatively descriptive, the objective is to analyze the management of village funds in an effort to improve development and community welfare in Tanjung Village, Kedamean District, Gresik Regency. The results obtained were that village fund financial management was carried out in accordance with government regulations. The government has agreed to state the priority for the use of village funds to be used in accordance with Village Ministerial Regulation No. 16 of 2018. The use and utilization of village funds used for programs and in carrying out activities in the sector of community empowerment and development. Another result obtained is that the government can use this research as a reference in the decision-making process as well as the consideration of established policy considerations.

Keywords : Financial management, development & community welfare.

PENDAHULUAN

Dalam situasi yang terjadi saat ini, tumpuan dibanyak sektor bergantung pada pemanfaatan teknologi yang telah tersedia agar dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dengan efektif serta efisien, tentu saja hal ini menjadi keuntungan bagi semua sektor yang sedang menjalankan strategi usaha agar dapat berkembang lebih cepat. Kemampuan yang dimiliki oleh teknologi dalam membantu semua aktivitas manusia tentu saja harus dibarengi dengan SDM yang mempunyai kualitas keterampilan serta ilmu pengetahuan dalam mengoperasikan teknologi agar dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya, sehingga keseimbangan yang terjadi antara teknologi serta SDM mampu saling menguntungkan.

Keberhasilan dalam memenangkan persaingan yang terjadi saat ini mempunyai kunci kuat yakni adanya kerjasama yang baik antara organisasi serta teknologi yang tersedia untuk dikombinasikan agar dapat menghasilkan suatu keterampilan yang dapat diterima di semua sektor, ketika SDM mampu memiliki keterampilan yang mumpuni, maka hal selanjutnya yang perlu dilakukan ialah dengan cara untuk mengembangkan keterampilan tersebut menjadi keuntungan yang dapat dimanfaatkan dalam memperoleh jenjang karir yang baik dikemudian hari.

Suatu organisasi atau instansi harus memiliki program serta visi yang dijadikan sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pentingnya pengelolaan organisasi dengan menerapkan konsep profesionalisme agar segala komponen yang ada di organisasi mampu dijalankan sesuai tugasnya masing-masing. Terdapat banyak kepentingan yang ada di organisasi yang ujungnya ialah dapat menjalankan program yang telah ditetapkan, kepentingan ini tentu saja harus sesuai dengan kepentingan bersama yakni mensejahterakan masyarakat serta melakukan pengembangan potensi yang ada di setiap orang untuk ditingkatkan.

Dalam menjalankan program yang telah ditetapkan serta disepakati bersama, tentu saja membutuhkan sumber pendanaan yang besar agar kesempatan untuk berhasil menjalankan program tersebut kemungkinan lebih besar dapat tercapai, saat ini segala sesuatu yang telah direncanakan harus di dukung dengan strategi yang baik serta dana yang cukup, tentu saja jika semua komponen bisa berjalan dengan baik, maka tujuan yang telah ditetapkan serta disepakati bersama akan memiliki potensi berhasil lebih besar. Setiap instansi pemerintah pasti telah melakukan perencanaan yang dijadikan sebagai modal dasar dalam menjalankan strategi untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah memegang kendali secara penuh terkait pemanfaatan serta pengelolaan dana yang digunakan untuk menjalankan berbagai rencana yang telah ditetapkan, dalam pemanfaatan dana telah dilakukan audit oleh lembaga terkait agar dana yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, untuk menghindari dari penyalagunaan serta penyelewengan dana, diperlukan adanya pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai warga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan tentu saja sangat membantu dalam mengawal proses berjalannya program serta pengelolaan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat telah memberikan dana ke seluruh daerah yang ada untuk dipergunakan sebagai sumber keuangan dalam menjalankan berbagai rencana yang telah disusun yang mempunyai tujuan utama yakni mensejahterakan masyarakat, dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat selanjutnya akan diterima oleh kepala daerah masing-masing yang mempunyai wewenang untuk memanfaatkan dana tersebut dalam proses pembangunan di daerah masing-masing. Pemerintah pusat berharap dari dana yang telah disalurkan dapat membantu kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar dapat terealisasi dengan baik sesuai rencana awal yang telah disusun, pentingnya akan sumber dana untuk daerah-daerah dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat berharap pengelolaan keuangan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan, pentingnya ketersediaan informasi publik terkait pengelolaan dana dapat memberikan rasa percaya kepada masyarakat, dalam memegang prinsip akuntabilitas yang baik yakni dengan cara mempublikasikan seluruh hasil kerja serta rencana yang akan dilakukan, hal ini tentu saja dapat mendorong semangat setiap kepala daerah untuk memimpin program agar berjalan dengan baik, hal lain yang sangat membantu dari adanya sumber keuangan ialah dapat menyelamatkan situasi ekonomi pada daerah tertentu yang dianggap rentan terjadi krisis.

Saat ini pemerintah telah memprioritaskan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah tertentu yang dianggap rentan terjadi krisis ekonomi, dengan adanya program yang telah ditetapkan pemerintah yakni mendistribusikan sumber keuangan untuk dioptimalkan oleh kepala daerah masing-masing agar digunakan dalam program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih menganggur, saat ini kita dapat melihat bahwa

krisis ekonomi telah banyak berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun akibat terjadinya pandemi serta semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini telah mengganggu aktivitas manusia di banyak sektor, akibatnya kerugian material yang semakin bertambah setiap waktunya sangat memperburuk keadaan, hal ini tentu saja akan membuat masyarakat semakin frustrasi akan situasi yang tidak segera membaik. Krisis ekonomi sangat nyata dirasakan oleh masyarakat yang hidup di pedesaan, adapun kita sudah mengetahui fakta di lapangan bahwa masyarakat yang hidup di pedesaan sangat rentan terjadi krisis ekonomi yang akan memperbanyak angka kemiskinan, pemerintah telah memprioritaskan untuk mengembalikan kestabilan ekonomi melalui berbagai cara agar dampak pandemi bagi masyarakat yang hidup di pedesaan dapat dikendalikan dengan baik.

Sudah semestinya desa menjadi prioritas utama pemerintah untuk diperhatikan lebih banyak, pembangunan infrastruktur serta fasilitas harus diutamakan agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk aktivitas sehari-hari. Pentingnya upaya pemanfaatan dana telah dilakukan audit oleh lembaga terkait serta memegang prinsip kehati-hatian agar dana tersebut dapat produktif serta agar dana yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, untuk menghindari dari penyalagunaan serta penyelewengan dana, diperlukan adanya pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai warga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan tentu saja sangat membantu dalam mengawal proses berjalannya program serta pengelolaan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Adapun dana yang telah diberikan serta dipercayakan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya akan diterima oleh kepala daerah masing-masing yang mempunyai wewenang untuk memanfaatkan dana tersebut dalam proses pembangunan di daerah masing-masing serta mempunyai tujuan utama yakni mensejahterakan masyarakat dengan tersedianya berbagai fasilitas. Pemerintah pusat berharap dari dana yang telah disalurkan dapat membantu kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar dapat terealisasi dengan baik sesuai rencana awal yang telah disusun, pentingnya akan sumber dana untuk daerah-daerah dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya undang-undang untuk mengatur desa, maka desa akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena penyelenggaraan pemerintah desa dibiayai sepenuhnya oleh masyarakat, dan bukan oleh beberapa orang, karena dalam proses pelaksanaan desa akan ada kontak langsung dengan masyarakat serta peran desa juga akan memberikan pelayanan, sehingga diharapkan dapat memberikan saran dan prasarana yang handal dan memadahi dalam pengelolaan keuangan desa supaya penerapannya lebih konsisten dalam jangka waktu yang panjang.

Pengoptimalan dana desa tentu saja sangat membantu pemerintah pusat dalam upayanya untuk membentuk masyarakat yang sejahtera serta kompeten sehingga dapat menciptakan potensi untuk bersaing di dunia kerja, kita lebih tahu bahwa potensi yang ada di desa ialah terkait pertanian serta pengelolaan sumber daya alam yang masih dilakukan secara tradisional, kurangnya perhatian pada sektor pertanian tentu saja sangat menyulitkan untuk mengembangkan agraria yang moderen serta mampu menghasilkan potensi pertanian yang berkualitas, sehingga sangat penting dukungan langsung dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan langsung berupa pendanaan serta pelatihan kepada para petani agar bisa meningkatkan potensinya.

Pentingnya upaya dalam pemanfaatan dana telah dilakukan perhitungan yang teliti, perhitungan yang dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian agar dana tersebut dapat produktif serta agar dana yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik sebagaimana mestinya,

untuk menghindari dari penyalagunaan serta penyelewengan dana, diperlukan adanya pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai warga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan tentu saja sangat membantu dalam mengawal proses berjalannya program serta pengelolaan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Desa Tanjung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Tanjung Krajan, Dusun Tempel, Dusun Dukuhan, Dusun Sawen. Desa Tanjung mempunyai sektor unggulan seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perternakan. Sehingga keuangan desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berada di Desa Tanjung agar bisa meningkatkan pembangunan desa dan untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadikan desa sejahtera dan mandiri serta mengurangi pengangguran yang akan menyebabkan kemiskinan meningkat. Didesa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik jumlah keluarga miskin mengalami naik turun pada tahun 2017 sebanyak 280 kartu keluarga, ditahun 2018 sebanyak 240 kartu keluarga, ditahun 2019 sebanyak 150 kartu keluarga, dan ditahun 2020 sebanyak 170 kartu keluarga dari jumlah kartu keluarga sebanyak 1.038. hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi aktif dalam masyarakat dan lemahnya organisasi yang mendukung kegiatan kemasyarakatan.

METODE

Riset ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, adapun tempat yang digunakan ialah Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, subyeknya ialah kepala desa, sekretaris, bendahara, BPD, dan masyarakat desa.

HASIL

Didapatkan hasil dari penelusuran terkait pengelolaan keuangan desa yang bisa dipakai untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Diperoleh hasil pengelolaan keuangan dana desa dilakukan telah sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemerintah telah sepakat menetapkan prioritas pemakaian dana desa untuk dipakai sesuai dengan peraturan Menteri Desa No.16 Tahun 2018. Penggunaan serta pemanfaatan dana desa yang dipakai untuk program serta dalam menjalankan aktivitas disektor pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Hasil lain yang didapatkan ialah pemerintah dapat memakai riset ini sebagai acuan pada proses pengambilan keputusan serta pertimbangan terkait kebijakan yang ditetapkan.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa aspek perencanaan, Pentingnya upaya pemanfaatan dana telah dilakukan audit oleh lembaga terkait serta memegang prinsip kehati-hatian agar dana tersebut dapat produktif serta agar dana yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, untuk menghindari dari penyalagunaan serta penyelewengan dana, diperlukan adanya pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai warga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan tentu saja sangat membantu dalam mengawal proses berjalannya program serta pengelolaan dana yang telah dikeluarkan Proses perencanaan terkait penggunaan dana desa yang akan digunakan dalam tahun berjalan yang dibuat dalam bentuk laporan yang akan diserahkan kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi dan pengesahan guna proses pencairan dana desa bisa segera diberikan kepada pemerintah desa. Dalam aspek pelaksanaan penggunaan keuangan desa khususnya dana desa nampak dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan tujuan pemberian dan penggunaan dari dana desa yang diberikan oleh

pemerintah. meskipun masih terdapat suatu prosedur yang belum dijalankan, dalam anggaran pendapatan serta realisasi penggunaan dari Dana Desa beserta pendapat desa lainnya digunakan dalam bidang pembangunan sebesar 70% dan 30% untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan program yang telah ditetapkan serta disepakati bersama, tentu saja membutuhkan sumber pendanaan yang besar agar kesempatan untuk berhasil menjalankan program tersebut kemungkinan lebih besar dapat tercapai, saat ini segala sesuatu yang telah direncanakan harus di dukung dengan strategi yang baik serta dana yang cukup, tentu saja jika semua komponen bisa berjalan dengan baik, maka tujuan yang telah ditetapkan serta disepakati bersama akan memiliki potensi berhasil lebih besar. Setiap instansi pemerintah pasti telah melakukan perencanaan yang dijadikan sebagai modal dasar dalam menjalankan strategi untuk mensejahterakan masyarakat.

Sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pemerintah tentu saja diyakini bisa membantu meringankan beban yang tengah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah memegang kendali secara penuh terkait pemanfaatan serta pengelolaan dana yang digunakan untuk menjalankan berbagai rencana yang telah ditetapkan, dalam pemanfaatan dana telah dilakukan audit oleh lembaga terkait agar dana yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, untuk menghindari dari penyalagunaan serta penyelewengan dana, diperlukan adanya pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai warga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan tentu saja sangat membantu dalam mengawal proses berjalannya program serta pengelolaan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pelaporan dana desa mempunyai tiga tahap, yang pertama laporan peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala desa kepada Bupati melalui camat. Tahap kedua, laporan realisasi penyerapan dan output dana desa tahun sebelumnya dari Kepala desa kepada Bupati melalui Camat. Terakhir tahap ketiga, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa dari Kepala desa kepada Bupati melalui Camat. Semua laporan tersebut sudah dibuat dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Tanjung. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh (Ishad, 2018) tahapan pelaporan ADD masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan kepada pihak pemerintah kota.

Aspek pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung secara administrasi telah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur Pemendagri No.20 Tahun 2018, yang dilakukan dengan membuat laporan dengan cara memberikan informasi melalui papan informasi yang bersumber pendapatan desa dan penggunaan dana yang sudah direalisasikan. Prinsip pengelolaan anggaran dana desa sudah di lakukan dengan efektif dan sesuai peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

1. Perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, dan dari pihak pemerintah sudah menjalankan proses perencanaan dengan baik dan tepat sesuai aturan yang berlaku proses perencanaan dimulai dari pembuatan peraturan tentang penggunaan APBDesa tahun berjalan dan mengadakan proses musyawarah untuk rencana pembangunan desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung telah dilaksanakan dengan baik dimana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dijalankan sesuai porsi bagiannya yaitu untuk bidang pembangunan serta bidang pemberdayaan.

3. Penatausahaan pengelolaan dana desa telah dilakukan Bendahara desa telah melaksanakannya dengan baik. Bendahara Desa Tanjung melakukan prosedur terkait penatausahaan mulai dari penerimaan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan proses penatausahaan sudah bendahara kerjakan dengan menggunakan buku-buku pembantu sehingga menghasilkan laporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pelaporan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa secara umum sudah dilakukan dengan baik.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah direalisasikan dengan baik pihak pemerintah Desa Tanjung secara administrasi telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur Pemendagri No. 20 tahun 2018, pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat sebuah laporan dengan cara memberikan informasi lewat papan informasi yang bersumber pendapatan desa dan penggunaan dana yang telah direalisasikan. , saat ini segala sesuatu yang telah direncanakan harus di dukung dengan strategi yang baik serta dana yang cukup, tentu saja jika semua komponen bisa berjalan dengan baik, maka tujuan yang telah ditetapkan serta disepakati bersama akan memiliki potensi berhasil lebih besar.

IMPLIKASI

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam mengelola dana desa guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Sebab, dana desa dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup manusia untuk mengurangi kemiskinan. Diharapkan dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa tanjung harus senantiasa mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan agar dapat mengelola anggaran dana desa secara tepat dan harus lebih banyak berkoordinasi dengan lembaga - lembaga masyarakat.

Pemerintah memegang kendali secara penuh terkait pemanfaatan serta pengelolaan dana yang digunakan untuk menjalankan berbagai rencana yang telah ditetapkan, dalam pemanfaatan dana telah dilakukan audit oleh lembaga terkait agar dana yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, untuk menghindari dari penyalagunaan serta penyelewengan dana, diperlukan adanya pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai warga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan tentu saja sangat membantu dalam mengawal proses berjalannya program serta pengelolaan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dalam menjalankan program yang telah ditetapkan serta disepakati bersama, tentu saja membutuhkan sumber pendanaan yang besar agar kesempatan untuk berhasil menjalankan program tersebut kemungkinan lebih besar dapat tercapai, saat ini segala sesuatu yang telah direncanakan harus di dukung dengan strategi yang baik serta dana yang cukup, tentu saja jika semua komponen bisa berjalan dengan baik, maka tujuan yang telah ditetapkan serta disepakati bersama akan memiliki potensi berhasil lebih besar. Setiap instansi pemerintah pasti telah melakukan perencanaan yang dijadikan sebagai modal dasar dalam menjalankan strategi untuk mensejahterakan masyarakat.

KETERBATASAN PENELITIAN

Terdapat batasan yang terjadi selama proses penelitian berlangsung yakni lokasi penelitian hanya dapat dilakukan disatu desa, dan objek penelitian hanya satu desa yaitu dana desa, selain itu para peneliti tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, sehingga peneliti sebatas memahami dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan semakin banyak peneliti untuk melakukan perbandingan antar desa yang berbeda, dan berharap untuk dapat menambah

objek penelitian menjadi dua objek atau lebih, seperti ADD dan Pendapatan Asli Desa (PADes), karena peneliti lain berharap dapat berpartisipasi langsung dalam pengelolaan dana desa agar mereka lebih mudah memperoleh informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizatul U. 2018. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Islam, I. C. 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Letik, A. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal ilmiah wahana Bhakti Praja*. 9(1):3152
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018. Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomer 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Permatasai, E., Sopanah., & Khajanah, H. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Conference on innovation and application of science and technology*. 186-194
- Permendagri No.2 Tahun 2018., Permendagri PDTT No.16 Tahun 2018. (2019). *Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. Cibubur: Bee Media Pustaka
- Sofiyanto, M., Ronny, M. M., & M. Agus, S. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*. 6 (4)
- Shuha, K. (2018) Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman) . *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Palembang*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Yatim, Nur, Q. (2018) Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandan Blole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Yohanes, Victoria, A., & Abd. R. (2018). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 7(2) : 71-76